

# **PROFIL SEKRETARIAT DPRD TAHUN ANGGARAN 2023**



**SETWAN KAB. ROTE NDAO  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya, maka penyusunan Profil Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai media informasi Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao menyajikan gambaran pelayanan dan capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023.

Dalam penyusunan Profil Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023, kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam menyajikan informasi gambaran pelayanan dan kinerja Sekretariat DPRD secara lengkap dan sempurna. Untuk itu, semua masukan berupa saran dan kritik konstruktif diperlukan untuk menyempurnakan profil ini. Semoga Profil Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao menjadi media informasi tentang pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 dan menjadi bahan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao ke depan.

Ba'a, 10 - 07 - 2023

Sekretaris DPRD Kab Rote Ndao



Benyamin Koamesah, S.Pd

NIP. 19670828 199903 1 008



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	1
C. Sejarah Singkat Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao .....	1
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KAB. ROTE NDAO</b> .....	<b>3</b>
A. Visi dan Misi Kabupaten Rote Ndao .....	3
B. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao ..	3
C. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao .....	4
D. Sumber Daya Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao .....	5
E. Sumber Daya Modal .....	10
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>13</b>
A. Administrasi .....	13
B. Transparansi Keuangan .....	17
<b>BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS</b> .....	<b>45</b>
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	45
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	48
C. Telaahan Renstra Kementrian PPN/Bapenas dan Provinsi NTT .....	49
D. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup .....	50
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> ..	<b>53</b>
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan.....	53
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	56

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin .....	5
Tabel 2.2.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin .....	6
Tabel 2.3.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Jabatan .....	7
Tabel 2.4.	Jumlah Tenaga Kontrak Daerah Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023 ...	8
Tabel 2.5.	Daftar Nama Aset Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao Tahun 2023.....	10
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan .....	14
Tabel 3.2.	Rencana Kerja Tahunan .....	16
Tabel 3.3.	Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	19
Tabel 3.4.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Lembaga DPRD dalam rangka Mendukung Tugas, Fungsi dan Wewenang.....	23
Tabel 3.5.	Konversi bobot indikator Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD .....	31
Tabel 3.6.	Konversi bobot indikator Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam dokumen rancangan lima tahunan ( RPJM ) maupun dokumen rencana tahunan ( RKPD ) .....	33
Tabel 3.7.	Konversi bobot indikator Terintegrasinya Program-Program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD .....	35
Tabel 3.8.	Program Pendukung Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Lembaga DPRD dalam rangka Mendukung Tugas, Fungsi dan Wewenang.....	38
Tabel 3.9.	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Lembaga DPRD dalam rangka mendukung Tugas, Fungsi dan Wewenang .....	38
Tabel 3.10.	Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao ....	40
Tabel 3.11.	Realisasi Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao Tahun 2023.....	41
Tabel 4.1.	Pemetaan Masalah untuk Penentuap Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	45
Tabel 4.2.	Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	48
Tabel 5.1.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan.....	53



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 .....	5
Gambar 3.1. Tren Jumlah Peraturan Daerah Yang Ditetapkan Tahun 2016 - 2023 .....	26
Gambar 3.2. Tren Jumlah Keputusan DPRD yang Dihasilkan Tahun 2016-2023 .....	29
Gambar 3.3. Tren Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang Dihasilkan Tahun 2016-2023 .....	30
Gambar 3.4. Tren Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2016-2023 .....	32
Gambar 3.5. Tren Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam dokumen rancangan lima tahunan ( RPJM ) maupun dokumen rencana tahunan ( RKPD ) Tahun 2016-2023 .....	34
Gambar 3.6. Tren Terintegrasinya Program-Program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Tahun 2016-2023 .....	36

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) merupakan syarat mutlak dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai cita – cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. *Good governance* memerlukan adanya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyaraaktan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao dengan tugas pokoknya adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao memaparkan Profil Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai gambaran hasil pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dapat menjadi rujukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pada tahun berikutnya.

### **B. Tujuan**

Tujuan penyusunan profil Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 adalah :

- a. Menggambarkan sejauh mana ketersediaan sumber daya dan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao selama Tahun 2023.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan instansi yang lebih tinggi tentang keberhasilan yang dicapai serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

### **C. Sejarah Singkat Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao berada di pulau Rote di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Didirikan sejak terbentuknya Kabupaten Rote Ndao di Nusa Tenggara Timur berdasarkan



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002. Sekretariat DPRD mempunyai deretan kepemimpinan sebagai berikut:

1. Drs. Zakarias Toulasik dari Tahun 2002 sampai dengan tahun 2011;
2. Domi Stev Nunuhitu, SH dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014;
3. Drs. Hanok Agustinus Ndoen dari Tahun 2014 sampai dengan 2015;
4. Drs. Erenst S.Z. Pella, M.Si dari Tahun 2015 sampai dengan 2016;
5. Daniel Zacharias, SE dari Tahun 2016 sampai dengan 2018;
6. Benyamin Koamesah, S.Pd dari Tahun 2018 sampai dengan sekarang.

Pada Tahun 2017 terjadi perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao. Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berubah menjadi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao.

Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra. Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao terdiri dari Kepala Bagian yang didukung oleh 6 (enam) Kepala Sub Bagian yang berfungsi sebagai *supporting staf*, yaitu Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Urusan Dalam, Sub Bagian Humas dan Protokol, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan, Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Legislasi, Sub Bagian Alat Kelengkapan.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

#### A. Visi dan Misi Kabupaten Rote Ndao

##### 1. Visi

Visi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024 yaitu: “ **Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang Bermartabat Dan Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian Dan Perikanan**”

##### 2. Misi

Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut;

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan;
3. Meningkatkan kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik yang prima.

#### B. Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao sesuai Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut:

##### 1. Tugas Pokok

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

##### 2. Fungsi

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **1. Kelompok Jabatan Fungsional**

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat. Pada saat ini untuk Jabatan Fungsional di Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao belum dibentuk.

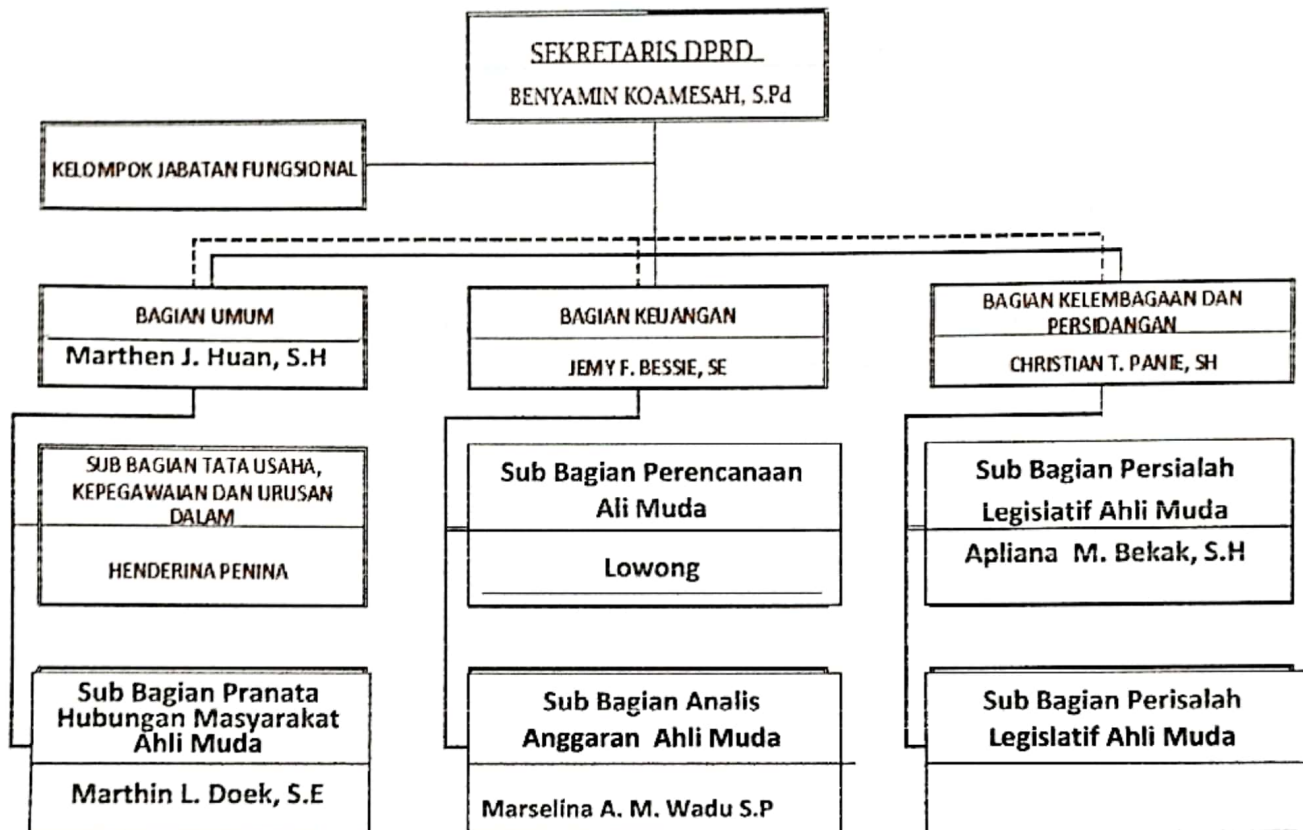
### **C. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao**

Struktur Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao dipimpin oleh Sekretaris DPRD dan membawahi 3 bagian, yakni:

1. Bagian Umum terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Urusan Dalam;
  - b. Sub Bagian Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda.
2. Bagian Kelembagaan dan Persidangan terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perisalah Legislatif Ahli Muda
  - b. Sub Bagian Perisalah Legislatif Ahli Muda.
3. Bagian Keuangan terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan Ahli Muda
  - b. Sub Bagian Analis Anggaran Ahli Muda.

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:

**Gambar 2.1.**  
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021



Sumber Data : Setwan Kab. Rote Ndao Tahun 2021

#### D. Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao

##### 1. Sumber Daya Manusia

Adapun jumlah kekuatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao saat ini berjumlah 23 (dua puluh dua) orang yang terdiri dari 16 (enam belas) orang laki-laki dan 7 (enam) orang perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Keadaan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao  
Berdasarkan Pangkat / Golongan Dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Golongan Ruang	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	IV/c	Pembina Utama Muda	1	-	1
2	IV/b	Pembina Tk.I	1	-	1
3	IV/a	Pembina	2	-	2
Jumlah Golongan IV			4	-	4
4	III/d	Penata Tk.I	1	3	4
5	III/ c	Penata Muda	1	-	1
6	III/b	Penata	1	-	1



No	Golongan Ruang	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
7	III/a	Petenta Muda Tk.I	5	3	8
		Jumlah Golongan III	5	3	14
7	II/d	Pengatur Tk.I	1	-	1
	II/e	Pengatur	-	-	-
8	II/b	Pengatur Muda Tk.I	2	-	2
	II/a	Pengatur Muda	1	1	2
		Jumlah Golongan II	4	1	5
		<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>23</b>

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang terdiri dari golongan IV sebanyak 4 (empat) orang, golongan III sebanyak 14 (empat belas) orang dan golongan II sebanyak 5 (lima) orang.

Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.  
Keadaan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	SI	8	2	10
2	DIII	1	-	1
3	SLTA/BMK	7	4	12
	<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>23</b>

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang terdiri dari pendidikan SI berjumlah 10 (sepuluh) orang, DIII berjumlah 1 (satu) orang dan BMA berjumlah 12 (duabelas) orang.

Busunan kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3.

Jumlah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Pangkat,  
Golongan Dan Jabatan Tahun 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN/GOLONGAN RUANG
1	Benyamin Koamesah, S.Pd 19670828 199903 1 008	Sekretaris DPRD Pembina Utama Muda, IV/C
2	Marten J. Huan, Sh 19680917 199310 1 001	Kabag. Umum Pembina Tk. I, IV/B
3	Christian T. Panie, SH 19680330 199203 1 003	Kabag. Kelembagaan dan Persidangan Pembina, IV/A
4	Jemy F. Bessie, SE 19780118 200701 1 007	Kabag. Keuangan Pembina, IV/A
5	Marthin L. Dock, SE 19790320 200701 1 008	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Penata Tk. I, III/D
6	Henderina Penina 19691109 199103 2 004	Kasubag. TU, Kepegawaian dan Urusan Dalam Penata Tk. I, III/D
7	Marselina A. Mau Wadu, SP 19760517 200701 2 018	Analisis Anggaran Ahli Muda Penata Tk. I, III/D
8	Apliana M. Bekak, SH 19680401 200701 2 030	Perisalah Legislatif Ahli Muda Penata Tk. I, III/D
9	Zakarias Y.M. Tamcon, A. Md 19790527 200604 1 016	Pelaksana Penata , III/C
10	Charles Kalau, SH 19751311 200604 1 010	Pelaksana Penata Muda Tk. I, III/B
11	Fredy Abraham Bisingslasi 19740617 200501 1 012	Pelaksana Penata Muda III/A
12	Revindo R. Fanggidae 19830911 200604 1 006	Pelaksana Penata , III/A
13	Yohanis R. Elimaafe 19751105 200701 1 018	Pelaksana Penata Muda III/A
14	Agustina Manubulu 19830813 200701 2 004	Pelaksana Penata Muda III/A
15	Ranthi P.O. Nggili 19861012 200701 2 001	Pelaksana Penata Muda III/A
16	Angela Mercy Lamén 19770727 200701 2 037	Pelaksana Penata Muda III/A



NO	NAMA/NIP	JABATAN/GOLONGAN RUANG
17	Prendy Anabokay,SH 19931001 202203 1 004	Pelaksana Penata Muda III/A
18	Randy Yonard Pellokila,SH 19930603 202203 1 002	Pelaksana Penata Muda III/A
19	Zakarias E. Lalay 19691221 200701 1 016	Pelaksana Pengatur Tk.I II/D
20	Marthinus Suek 19750524 201406 1 004	Pelaksana Pengatur Muda Tk. I, II/B
21	Yeverson Octavianus 19860607 201406 1 002	Pelaksana Pengatur Muda Tk. I, II/B
22	Dominggus Edon 19730508 201212 1 001	Pelaksana Pengatur Muda, II/A
23	Norce Ariance Pello 19861125 201212 2 003	Pelaksana Pengatur Muda, II/A

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao Tahun 2021

Disamping tenaga Pegawai Negeri Sipil, Pelaksanaan operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao di dukung tenaga kontrak daerah yang dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4.  
Jumlah Tenaga Kontrak Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao  
Berdasarkan Jabatan Dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Heryanus Nubatonis	Penjaga Malam		-	
2	Martha Sarfince Ndolu	Pembantu Sekretaris Pimpinan	1	1	
3	Iron Modok	Pembantu Sekretaris Pimpinan	1	-	
4	Elisabet Haekase	Pramusaji Rumah Jabatan Ketua DPRD	-	1	
5	Norma Y. Tabelak	Pramusaji Rumah Jabatan Ketua DPRD	-	1	
6	Melkinto Muda	Pramu Saji Rumah Jabatan Ketua DPRD	1		
7	Defri Ariyanto Edi Taneo	Pramu Saji Wakil Ketua DPRD	1		
8	Seprianus Ndun	Pramu Saji Wakil Ketua	1	-	

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
		DPRD			
9	Ardo J.H. Molle	Pramu Saji Wakil Ketua DPRD	1	-	
10	Norani Henukh-Dethan	Pramu Saji Wakil Ketua DPRD Pramu Saji	-	1	
11	Dewi Ririn Kade	Pramu Saji Ketua DPRD		1	
12	Absalom Y. Malaipada	Sopir	1	-	
13	Jefri H.S.Y. Taek	Sopir	1	-	
14	Ruben Pulingdopong	Sopir	1		
15	Marthen Ous. Nassa	Sopir	1		
16	Fance Saudale	Sopir	1	-	
17	Joli M. Bailao	Operator Komputer	1	-	
18	Atnis A. Adu	Operator Komputer	1	-	
19	Erni Foes	Operator Komputer Fraksi Golkar	-	1	
20	Yance M. Pandie	Operator Komputer Fraksi Persatuan Bangsa	1	-	
21	Nofri Y. Pandie	Cleaning Service	-	1	
22	Pelle Y. Feoh	Cleaning Service	1	-	
23	Andri Y.L.Ndolu	Cleaning Service	1	-	
24	Jofni E. Bessie	Cleaning Service	1	-	
25	Novita Ledoh	Cleaning Service	-	1	
26	Jack W. Balukh, A.Md	Cleaning Service Fraksi Golkar	1	-	
27	Semmy M. Mooy	Cleaning Service Fraksi PDIP	1	-	
28	Dorce M. Sakan	Cleaning Service Demokrat Sejahtera	-	1	
29	Simon Feoh, SE	Cleaning Service Fraksi Hanura	1	-	
30	Arto E. Lian	Cleaning Service Fraksi Persatuan Bangsa	1	-	
31	Johanis Kiak, SH	Operator Komputer	1	-	
32	Riki Ronaldi Ndun	Cleaning Service	1		
33	Rivad Z.H. Manoe	Operator Komputer	1		
34	Mercy B. Ndun	Operator Komputer	-	1	
35	Ariance Nuryanyi Ndun	Operator Komputer	-	1	
36	Yandri Son Nggadas	Operator Komputer	1		
37	Educa Talomanafe	Operator Komputer	-	1	
38	Werli Y. Ndolu	Operator Komputer	-	1	
39	Tiara T.E.Dano,S.Pi	Operator Komputer	-	1	
40	Arvindo G.B.Molle	Cleaning Service	1		
41	Jitron Sesun	Cleaning Service	1		



No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
42	Kriama A. amir	Cleaning Service		1	
	<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>42</b>

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao Tahun 2021

Dilihat dari tabel 2.4 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kontrak di Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao berjumlah 42 orang yang terdiri dari 22 orang laki-laki dan 20 orang perempuan, yang menduduki jabatan penjaga kantor sebanyak 1 orang, Pembantu Sekretaris sebanyak 4 orang, Pramusa RUMAH Jabatan sebanyak 8 orang, Sopir sebanyak 5 orang, Operator Komputer sebanyak 7 orang, Cleaning service sebanyak 17 orang.

#### E. Sumber Daya Modal

Sarana prasarana kedinasan berupa peralatan kantor dan aset seperti mebelair, mesin tik, komputer dan lain-lain yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut:

Tabel 2.5.

Daftar Aset Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI ASET		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
<b>A.</b>	<b>ASET TETAP</b>				
<b>I</b>	<b>ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>1,340</b>			
	<b>Alat-alat Angkutan</b>	<b>17</b>			
	- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1	1		
	- Sepeda Motor	16	13		3
	<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	<b>4</b>			
	- Batteray Charger				
	- Memori Programmer				
	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>1,234</b>			
	- Lemari Besi	3	3		
	- Rak Kayu	4			4
	- Filling Besi/Metal	10	6		4
	- Brand Kas	1	1		
	- Lemari Makan	3	3		
	- Papan Nama Instansi	44			44
	- Papan Pengumuman	2	2		
	- Mesin Absensi	1	1		
	- Genset	1	1		
	- Lemari Kayu	29	25		4
	- Rak Kayu	14	8		6
	- Meja Besi/Metal	4	4		

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI ASET		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
-	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	4	4		
-	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	6	6		
-	Meja Tulis	1	1		
-	Meja Makan	3	3		
-	Meja Reseption	6	6		
-	Kursi Tamu	6	6		
-	Kursi Lipat	10			10
-	Seprei	8	8		
-	Meja Biro	10	10		
-	Sofa	19	9		10
-	Kaca Riben	4	4		
-	Kursi Kerja	20	20		
-	Gordyn	465	232		233
-	Rak TV	1	1		
-	Karpot	72			72
-	Jam Mekanis	1			1
-	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1	1		
-	Mesin Cuci	5	5		
-	Lemari Es	4	3		
-	AC Unit	29	29		
-	AC Split	3	3		
-	Kompot Gas	1			1
-	Kompot Minyak	9	9		9
-	Alat Dapur Lainnya	22	12		10
-	Alat Dapur Lainnya	1	1		1
-	Cangkir	348	348		248
-	Tabung Gas	11	3		8
-	Alat Dapur Lain-lain	2			2
-	Dispenser	8	2		6
-	Rice Cooker	1			1
-	Televisi	12	2		10
-	Camera Video	6			6
-	Camera Film	3			3
-	Seterika	1			1
-	Tangga Alumunium	2	2		
-	Mimbar/Podium	2	2		
-	Handy Cam	1		1	
-	Alat Rumah Tangga Lain-lain	36	20		16
-	Rak Jemuran	1			1
-	P.C Unit/ Komputer PC	16	2		14
-	Lap Top	37	11		2
-	Hard Disk	4			4
-	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	5			5
-	Printer	20	5		15
-	Flashdisk	4			4
-	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	2			2
-	UPS	9			9
-	Harddisk Eksternal	2			2



NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI ASET		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
-	Memory	12			12
-	Modem	2	2		2
-	Meja Kerja Pejabat Eselon II	4	4		
-	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	7		
-	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	32	10		12
-	Meja Kerja	45	25		15
-	Meja Rapat Pejabat Eselon II	49	49		
-	Meja Tamu Ruangan Biasa	5	4		1
-	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	12	12		
-	Kursi Rapat Ketua / Wakil Ketua DPRD	6		6	
-	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	23	23		
-	Tempat Tidur (3 buah)	3	3		
-	Spon (3 buah)	3	3		
-	Lemari 3 Pintu (3 buah)	9	9		
-	TV 32 Inchi (3 buah)	3	3		
-	Antena dan Reciver Parabol (3 buah)	3	3		
<b>Alat Studio dan Alat Komunikasi</b>		<b>95</b>			
-	Proyektor + Attachment	3	3		
-	Audio Tape Reel Recorder	2			2
-	Peralatan studio Visual Lain-lain	2	1		2
-	MP4 Video - Audio Player	1	1		
-	Layar Proyektor				
-	Camera Electronic	2			2
-	Tripod Camera	2			2
-	Lensa Kamera	2			2
-	Alat Penyimpan Data	1			1
-	Peralatan Computing Lain-lain	2			2
-	Amplifier	1	1		
-	Microphone	30	30		
-	Loudspeaker	4	4		
-	Pesawat Telephone	3			3
-	Intercom	10	10		10
-	Facsimile	2			2
-	Antena SHF/Parabola Portable	2	2		
-	Antena SHF/Parabola Stationary	1	1		
-	CCTV 24 Titik (Kamera, Monitor, Instalasi)	24	24		
<b>Alat Laboratorium</b>		<b>31</b>			
-	Video Printer	1			1
-	Bendera dan Gabus	1			1
-	Gelas Piala	15			15
-	Panci	4	2		2
-	Bendera Merah Putih	1	1		
-	Tape Recorder	9			9
<b>II ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN</b>					
<b>Bangunan Gedung</b>		1.288 M2			
-	Bangunan Gedung Kantor Permanen				
-	Gedung Garasi/Pool Permanen				
-	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen				



NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI ASET		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
	- Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain				
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen				
	- Rumah Negara Golongan II Type A Permanen				
	- Rumah Negara Golongan II Type A Permanen				
	- Rumah Negara Golongan II Type A Permanen				
<b>III</b>	<b>DAFTAR ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>				
	- Jaringan Telepon Di atas Tanah Kapasitas Kecil				
<b>IV</b>	<b>ASET TETAP ASET TETAP LAINYA</b>				
	Buku dan Perpustakaan	43			43
	- Ilmu Pengetahuan umum	43			43
<b>B.</b>	<b>ASET ASET LAINNYA</b>				

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao Tahun 2021

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. ADMINISTRASI

##### 1. Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao pada tabel berikut:

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kinerja Tujuan/Sasaran				
				Realisasi		Target		
				2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Lembaga DPRD Dalam Rangka Mendukung Tugas, Fungsi dan Wewenang	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Lembaga DPRD Dalam Rangka Mendukung Tugas, Fungsi dan Wewenang	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan	8	4	14	14	14
			Jumlah Keputusan DPRD yang dihasilkan	18	18	17	17	17
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang dihasilkan	1	-	1	1	1
			Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat - alat kelengkapan DPRD Kab. Rote Ndao	-	Ada	Ada	Ada	Ada
			Tersusun dan terintegrasinya program - program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan tahunan (RKPD)	-	Ada	Ada	Ada	Ada
			Terintegrasi Program - Program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD	-	Ada	Ada	Ada	Ada

Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024,  
Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Lembaga DPRD Dalam  
Rangka Mendukung Tugas, Fungsi dan Wewenang. Dengan sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Lembaga DPRD Dalam Rangka Mendukung Tugas, Fungsi dan Wewenang.

## **2. Rencana Kerja (RENJA)**

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023, merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan selama tahun 2023 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 berpedoman kepada Perubahan RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023. Dalam rangka menjamin terlaksananya program, kegiatan, dan sub kegiatan serta dalam rangka pencapaian kinerja, maka ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2023 dengan efektif dan efisien.
- b. Perubahan Renja Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran.
- c. Menjamin konsistensi dan sinergitas antara dokumen perubahan RKPD, dokumen Perubahan Renja dan dokumen pelaksanaan anggaran.
- d. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023.

Perubahan Renja Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip – prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.



### 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 pada tabel berikut:

Tabel 3.2.

Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan lembaga DPRD dalam rangka mendukung tugas, fungsi dan wewenang	1.1. Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan	14 Perda
		1.2. Jumlah Keputusan DPRD yang dihasilkan	17 Keputusan
		1.3. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD yang dihasilkan	1 Ranperda
		1.4. Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat - alat kelengkapan DPRD Kab. Rote Ndao	Ada
		1.5. Tersusun dan terintegrasinya program - program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan tahunan(RKPD)	Ada
		1.6. Terintegrasi Program - Program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD	Ada

#### **4. Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao memiliki 28 Standar Pelayanan Operasional, yaitu :

- 1) SOP Penanganan Surat Masuk Setwan;
- 2) SOP Penanganan Surat Masuk DPRD;
- 3) SOP Penanganan Surat Keluar Setwan;
- 4) SOP Penanganan Surat Keluar DPRD;
- 5) SOP Pengarsipan;
- 6) SOP Kenaikan Gaji Berkala PNS;
- 7) SOP Kenaikan Pangkat PNS;
- 8) SOP Cuti PNS;
- 9) SOP Penerimaan Barang Inventaris;
- 10) SOP Penatausahaan Barang Inventaris;
- 11) SOP Penyusunan Sambutan dan Makalah;
- 12) SOP Pendokumentasian Kegiatan;
- 13) SOP Penyusunan Risalah;
- 14) SOP Penyusunan Peraturan dan Keputusan;
- 15) SOP Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Komisi;
- 16) SOP Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas Panitia;
- 17) SOP SOP Pengajuan Gaji PNS;
- 18) SOP Pengajuan Kekurangan Gaji PNS;
- 19) SOP Penerbitan SPM/SP2D;
- 20) SOP Pencairan Dana Kegiatan;
- 21) SOP Penyusunan Laporan Kegiatan;
- 22) SOP Penyusunan Renstra;
- 23) SOP Penyusunan Renja;
- 24) SOP Penyusunan RKA;
- 25) SOP Penyusunan LKIP;
- 26) SOP Penyusunan LKPJ;
- 27) SOP Penyusunan LPPD;
- 28) SOP Penyusunan RKT.

#### **5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tidak Ada**

Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao tidak memiliki standar pelayanan minimal.

## **6. Jadwal Kegiatan Tahun**

Berdasarkan Kalender kerja DPRD, maka sekretariat DPRD memiliki 6 kegiatan yang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada tahun 2021, yaitu:

1. Rutinitas DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 dilaksanakan pada :
  - a) Minggu ke II Januari s/d minggu ke IV Februari 2023, meliputi kegiatan:
    - Penyusunan Kalender kerja DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023;
    - Pengharmonisasian dan Pemantapan Konsepsi tentang Propempera Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023;
    - Kunker Dalam Daerah;
    - Pembahasan dan penetapan Pokok – pokok pikiran DPRD;
  - b) Minggu ke II Januari s/d minggu ke IV Februari 2023, meliputi Kegiatan :
    - Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao;
    - Bimtek DPRD Pimpinan dan Anggota DPRD;
    - Pembahasan LKPJ Bupati Rote Ndao Tahun Anggaran 2023;
    - Reses I Anggota DPRD;
    - Rapat Koordinasi dan Konsultasi;
    - Kunker Dalam Daerah;
    - Kunker Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Sidang I DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 dilaksanakan pada minggu ke I Maret s/d minggu ke IV April 2023;
3. Sidang II DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 dilaksanakan pada minggu ke I Mei s/d minggu ke IV Juni 2023;
4. Sidang III DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 dilaksanakan pada minggu I Juli s/d minggu ke IV Agustus Tahun 2023;
5. Sidang IV DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 dilaksanakan pada minggu I September s/d minggu ke IV Oktober 2023;
6. Sidang V DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 dilaksanakan pada minggu I Nopember s/d minggu ke IV Desember 2023.

## **7. Laporan Pelaksanaan Kegiatan**

Seluruh kegiatan DPRD yang dijadwalkan pada tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.



## B. TRANSPARANSI KEUANGAN

### 1. RKA / DPA

Gambaran mengenai program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.373.121.800,- bertambah sebesar Rp. 565.572.600,- atau 2,46% menjadi Rp. 22.941.758.592,- dengan rincian:

- a. Belanja Operasi sebelum perubahan sebesar Rp.22.225.624.702,- bertambah sebesar Rp.362.990.000,- atau 1,60% menjadi Rp. 22.588.614.702,- dengan rincian sebagai berikut:
  - Belanja Pegawai sebelum perubahan sebesar Rp.10.816.756.237,- bertambah sebesar Rp.150.000,- atau 0,01% menjadi Rp.10.816.906.237,-
  - Belanja Barang dan Jasa sebelum perubahan sebesar Rp.11.408.868.465,- bertambah sebesar Rp.362.840.000 atau 3,08% menjadi Rp.11.771.708.465,-
- b. Belanja modal sebelum perubahan sebesar Rp.150.561.290,- bertambah sebesar Rp.202.582.600,- atau 57,36% menjadi Rp.353.143.890,-.

### 2. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 pada tabel berikut:

Tabel 3.3.

Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME	TARGET		ANGGARAN (RP)	REALISASI / OUTPUT	
1	2	3	4		5	6	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100	%	16.690.928.223	100	%
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	43.610.000	100	%

1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD, Perubahan Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD dan Perubahan DPA PD	12	Dok	24.136.000	12	dok
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD dan evaluasi renja per triwulan	7	Dok	19.474.000	7	dok
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,919,599,912</b>		<b>%</b>
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	75	org/bln	1,812,800,092	75	org/bln
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola APBD	5	Org	106,799,820	5	org
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>18.000,000</b>		<b>%</b>
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya honor Pengelola BMD Perangkat Daerah	3	org/bln	18.000,000	3	org/bln
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>676.800,000</b>		<b>%</b>
6	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah	95	org/bln	676.800,000	95	org/bln
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.133.028,430</b>		<b>%</b>
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bln	17.015.000	12	bln
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	10	Unit	694.945.000	9	unit
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	6	Unit	53.428.200	6	unit
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minum Jamuan Tamu	3720	Porsi	180.000.000	3720	porsi
11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	253864	Lembar	53,195,340	253859	lembar
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4	Media	31,599,900	4	media
13	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12	bln	93,912,170	12	bln
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	55	kali	130,146,000	55	kali
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>213,428,000</b>		<b>%</b>



15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	bln	19,959,000	12	bln
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumbat Daya Air dan Listrik	12	bln	193,469,000	12	bln
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>457,148,500</b>		<b>%</b>
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	15	unit	318,689,600	15	unit
18	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan mesin lainnya	32	unit	29,027,900	30	unit
19	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor Terpeliharanya Rumah Jabatan	1 3	gedung rujab	89,455,000	4	gedung rujab
20	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	30 12	unit unit	19,976,000	42	unit unit
	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Terselenggaranya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>9,599,066,845</b>		<b>%</b>
21	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Dana Operasional Pimpinan DPRD Tersedianya Gaji dan Tunjangan DPRD	28	org/bln	8,921,856,145	0	org/bln
22	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	125	setelan	305,790,700	125	setelan
23	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terjaminnya Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	25	org	371,420,000	25	org
	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Terselenggaranya Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,341,457,575</b>		<b>%</b>
24	Fasilitasi Fraksi DPRD	Tersedianya Fasilitas Fraksi DPRD	7	fraksi	136,157,780	7	fraksi
25	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Rapat Kelengkapan DPRD	100	kali	65,299,800	100	kali
26	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	4	rujab	1,139,999,995	4	rujab
	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>MENINGKATNYA KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>7,965,231,220</b>		<b>%</b>
	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2,071,514,600</b>		<b>%</b>
27	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terbentuknya Program Pembentukan Peraturan Daerah	12	ranperda	94,197,900	12	ranperda
28	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda (12 Ranperda) dan	12	ranperda	1,942,678,900	13	ranperda

		Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD (1 Perda)	1	perda inisiatif			perda inisiatif
29	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	2	kali	34,637,800	2	kali
	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Terselenggaranya Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	100	%	449,993,400		%
30	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	45	rapat	29,997,000	45	rapat
31	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	45	rapat	29,997,000	45	rapat
32	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	45	rapat	129,999,800	45	rapat
33	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	45	rapat	129,999,800	45	rapat
34	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	45	rapat	129,999,800	45	rapat
	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	100	%	70,000,000		%
35	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5	rapat	70,000,000	5	rapat
	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas DPRD</b>	100	%	1,476,353,000		%
36	Bimbingan Teknis DPRD	Terselenggaranya Bimbingan Teknis DPRD	4	kali	1,151,553,000	2	kali
37	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tersediannya Website DPRD	1	website	24,800,000	1	website
38	Penyediaan Kelompok Pakar Tim Ahli	Tersediannya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3	org	90,000,000	3	org
39	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersediannya Tenaga Ahli Fraksi	7	org	210,000,000	7	org
	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Terserapnya Aspirasi Masyarakat</b>	100	%	2,573,679,220		%
40	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja dalam Daerah	25 12	org kali	499,560,000	12	org kali
41	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersediannya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1	dok	30,499,920	1	dok
42	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses	3 0	kali org	2,043,619,300	3	kali org
	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Terselenggaranya Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao</b>	100	%	1,323,691,000		%
43	Koordinasi dan Konsultasi Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	24	kali	1,323,691,000	20	kali



### 3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Sasaran Kinerja Sekretariat DPRD yaitu **Meningkatnya kualitas pelayanan Lembaga DPRD dalam rangka mendukung Tugas, Fungsi dan Wewenang**, diukur dari 6 indikator terdiri dari :

- 1) Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan
- 2) Jumlah Keputusan DPRD yang dihasilkan
- 3) Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang dihasilkan
- 4) Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat - alat kelengkapan DPRD Kab. Rote Ndao
- 5) Tersusun dan terintegrasinya program - program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)
- 6) Terintegrasi Program - Program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD

Tabel. 3.4.

Capaian indikator kinerja sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan Lembaga DPRD dalam rangka mendukung Tugas, Fungsi dan Wewenang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RENSTRA 2024	% realisasi 2022 terhadap tahun 2021	% realisasi 2021 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan	Perda	8	14	4	28.57	14	50	28.57
2	Jumlah Keputusan DPRD yang dihasilkan	Keputusan	18	17	18	106	17	100	106
3	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang dihasilkan	Buah	1	1	0	0	1	0	0
4	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat - alat kelengkapan DPRD Kab. Rote Ndao	Ada	-	Ada	Ada	100	Ada	100	100



5	Tersusun dan terintegrasinya program - program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	Ada	-	Ada	Ada	100	Ada	100	100
6	Terintegrasi Program - Program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD	Ada	-	Ada	Ada	100	Ada	100	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan</b>						<b>72.41</b>	<b>Sedang</b>		

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja sasaran **Meningkatnya kualitas pelayanan Lembaga DPRD dalam rangka mendukung Tugas, Fungsi dan Wewenang** terdapat 6 (enam) indikator kinerja yaitu Jumlah Peraturan Daerah Yang Ditetapkan, Jumlah Keputusan DPRD Yang Dihasilkan, Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Yang Dihasilkan, Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kab. Rote Ndao, Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan Tahunan (RKPD), Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA dan Anggaran Kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.

Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1) Jumlah Peraturan Daerah Yang Ditetapkan.**

Jumlah Peraturan Daerah Yang Ditetapkan adalah Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Rote Ndao melalui persidangan DPRD Tahun 2023.

Rancangan Peraturan Daerah disiapkan oleh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya dalam menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah ini, Perangkat Daerah harus menyampaikan secara jelas, mengenai alasan-alasan, pertimbangan dan tujuan, materi muatan dan keterkaitan dengan peraturan perundang-perundangan lainnya. Lebih lanjut, setiap Rancangan Peraturan Daerah wajib dikonsultasikan dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka harmonisasi dan pembulatan konsep rancangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain:

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023;
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;



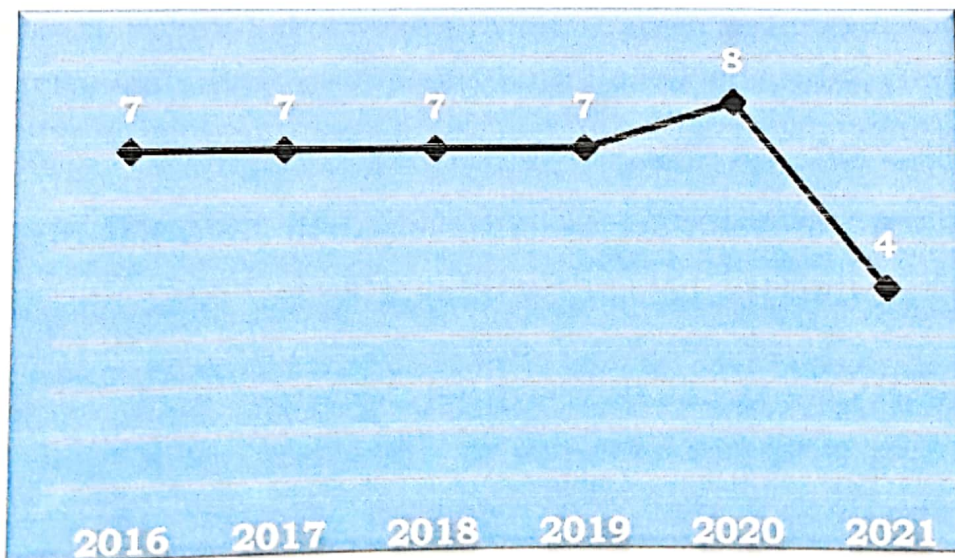
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021; dan
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan uraian penjelasan dan perhitungan capaian kinerja diatas, maka capaian indikator Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun 2022 sebanyak 4 (empat) Perda.

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan ditargetkan sebanyak 14 (empat belas) Peraturan Daerah dan terealisasi sebanyak 4 (empat) Peraturan Daerah dengan capaian kinerja sebesar 28,57%.

Capaian kinerja Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun 2022 sebanyak 4 (empat) Perda jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2021) sebanyak 8 (delapan) Perda, menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja tahun 2022 belum melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan penurunan kinerja yang capaian kinerjanya sebesar 50% dari tahun sebelumnya.

**Gambar 3.1.**  
**Tren Jumlah Peraturan Daerah Yang Ditetapkan**  
**Tahun 2016-2022**



Sumber : Data Olahan, 2022

Tren realisasi Jumlah Peraturan Daerah Yang Ditetapkan selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami



peningkatan kinerja yakni tahun periode 2016-2020, pada tahun 2021 mengalami penurunan kinerja yang hanya menghasilkan 4 (empat) Perda.

Realisasi indikator kinerja Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan tahun 2022 sebanyak 4 (empat) Perda apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebanyak 14 (empat belas) Perda, menunjukkan bahwa target akhir RENSTRA telah tercapai sebesar 28,57% dan masih terdapat gap sebesar 71,43%, meskipun demikian dengan tren peningkatan kinerja yang positif periode tahun 2016-2021 menunjukkan upaya strategis akan terus dilakukan untuk meningkatkan Jumlah Peraturan Daerah guna mencapai target akhir RENSTRA tahun 2024.

## **2) Jumlah Keputusan DPRD Yang Dihasilkan**

Indikator Jumlah Keputusan DPRD Yang Dihasilkan adalah capaian atas jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam Persidangan DPRD Tahun 2023. Adapun Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain:

- a) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 01/DPRD/RN/2022 Tentang Kalender Kerja DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022;
- b) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 02/DPRD/RN/2022 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022;
- c) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 03/DPRD/RN/2022 Tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2022;
- d) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 04/DPRD/RN/2022 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022;
- e) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 05/DPRD/RN/2022 Tentang Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Rote Ndao Tahun Anggaran 2022;
- f) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 06/DPRD/RN/2022 Tentang Berita Acara Persetujuan Hasil Pembahasan Gabungan Komisi Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
- g) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 07/DPRD/RN/2022 Tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022;

- h) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 08/DPRD/RN/2022 Tentang Tim Penyusun Naskah Akademik dan Ranperda Inisiatif DPRD Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- i) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 09/DPRD/RN/2022 Tentang Berita Acara Persetujuan Bersama Antara DPRD dan Pemerintah Terkait Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;
- j) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 10/DPRD/RN/2022 Tentang Persetujuan Penetapan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;
- k) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 11/DPRD/RN/2022 Tentang Berita Acara Kesepakatan KUA PPAS Tahun Anggaran 2022;
- l) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 12/DPRD/RN/2022 Tentang Berita Acara Kesepakatan PPAS Tahun Anggaran 2022;
- m) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 13/DPRD/RN/2022 Tentang Berita Acara Kesepakatan KUA Perubahan APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022;
- n) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 14/DPRD/RN/2022 Tentang Berita Acara Kesepakatan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022;
- o) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 15/DPRD/RN/2022 Tentang Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Rote Ndao Terhadap Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022;
- p) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 16/DPRD/RN/2022 Tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022;
- q) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 17/DPRD/RN/2022 Tentang Penandatanganan Berita Acara Hasil Pembahasan Antara Bupati dengan DPRD terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022;
- r) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 18/DPRD/RN/2022 Tentang Persetujuan Penetapan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022 Menjadi Peraturan Daerah Tahun 2022.

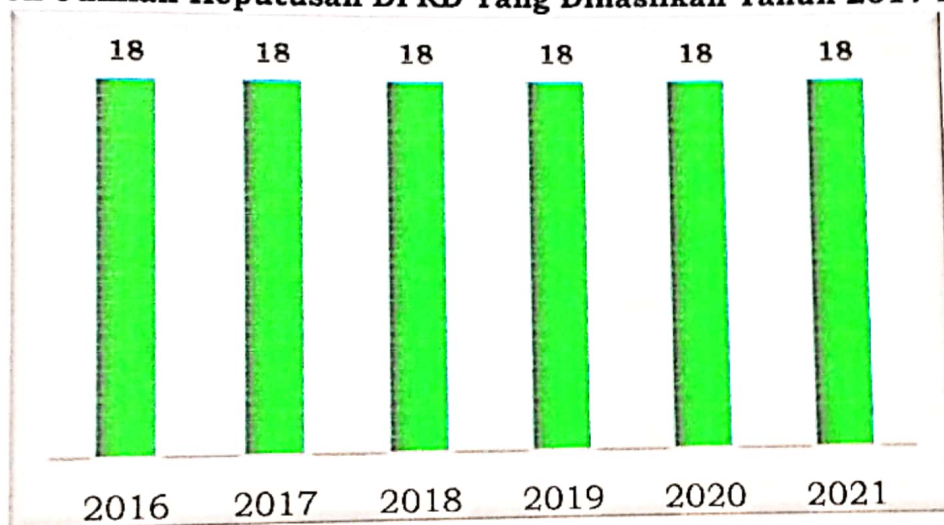
Berdasarkan uraian penjelasan dan perhitungan capaian kinerja diatas, maka capaian indikator Jumlah Keputusan DPRD Yang Dihasilkan pada tahun 2022 adalah 18 (delapan belas) keputusan.



Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Jumlah Keputusan DPRD Yang Dihasilkan pada tahun 2022 telah melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, Jumlah Keputusan DPRD ditargetkan sebanyak 17 (tujuh belas) Keputusan dan terealisasi sebesar 18 (delapan belas) Keputusan dengan capaian kinerja sebesar 106%.

Capaian kinerja Jumlah Keputusan DPRD Yang Dihasilkan pada tahun 2022 sebanyak 18 (delapan belas) Keputusan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2020) sebesar 18 (delapan belas) Keputusan, maka menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja tahun 2022 sama dengan tahun sebelumnya yaitu dengan capaian kinerja sebanyak 18 (delapan belas) Keputusan.

**Gambar 3.2.**  
**Tren Jumlah Keputusan DPRD Yang Dihasilkan Tahun 2017-2022**



Sumber : Olahan Data Sekretariat DPRD, 2022

Tren realisasi indikator Jumlah Keputusan DPRD Yang Dihasilkan selama 6 (enam) tahun terakhir menunjukkan capaian yang sama secara signifikan yakni periode tahun 2017-2022 dengan capaian kinerja sebanyak 18 (delapan belas) Keputusan.

Realisasi Jumlah Keputusan DPRD Yang Dihasilkan pada tahun 2022 sebanyak 18 (delapan belas) Keputusan jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebanyak 18 (delapan belas) Keputusan, maka menunjukkan bahwa telah melampaui target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan kinerja tercapai sebesar 106%, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja ini dengan tren yang positif dan optimis dalam melampaui target akhir RENSTRA tahun 2024.

### 3) Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Yang Dihasilkan

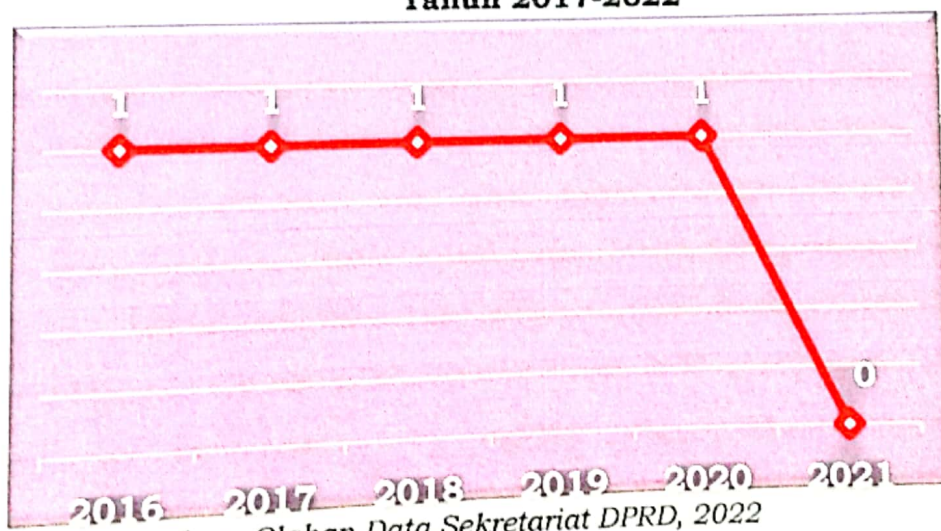
Indikator Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang Dihasilkan adalah capaian atas jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang Dihasilkan di tahun 2022. Pada tahun 2022 belum ada Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang dihasilkan.

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang Dihasilkan pada tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang Dihasilkan ditargetkan sebanyak 1 (satu) Ranperda dan terealisasi sebesar 0 (nol) Ranperda dengan capaian kinerja sebesar 0%.

Capaian kinerja Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang Dihasilkan sebanyak 0 (nol) ranperda jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2021) sebanyak 1 (satu) Ranperda, maka menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja tahun 2022 belum melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan penurunan kinerja dengan capaian kinerja sebesar 0% dari tahun sebelumnya.

**Gambar 3.3.**

**Tren Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Yang Dihasilkan Tahun 2017-2022**



Sumber : Olahan Data Sekretariat DPRD, 2022

Tren realisasi Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang Dihasilkan selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami peningkatan kinerja yakni tahun periode 2017-2022, pada tahun 2022 mengalami penurunan kinerja karena belum menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD.



Realisasi indikator kinerja Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang Dihasilkan pada tahun 2022 sebanyak 0 (nol) ranperda jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebanyak 1 (satu) Ranperda menunjukkan bahwa target akhir RENSTRA belum tercapai, meskipun demikian dengan tren peningkatan kinerja yang positif periode tahun 2016-2020 menunjukkan upaya strategis akan terus dilakukan untuk meningkatkan jumlah rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD yang dihasilkan guna mencapai target akhir RENSTRA tahun 2024.

#### 4) Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rote ndao

Indikator tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kab. Rote Ndao merupakan ketersediaan rencana kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD (Badan Anggaran, Banmus, BKD dan Komisi) di tahun 2022. Pada Setiap tahun anggaran, rencana kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD (Badan Anggaran, Banmus, BKD dan Komisi) selalu tersedia (ada sesuai target kinerjanya).

Penghitungan indikator Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kab. Rote Ndao menggunakan metode konversi kualitatif menjadi kuantitatif dengan pemberian bobot nilai sebagai berikut:

**Tabel 3.5**

**Konversi Bobot Indikator Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat - Alat Kelengkapan DPRD**

Kategori	Bobot Nilai
Ada	100
Tidak Ada	0

Sumber : Data Olahan, 2022

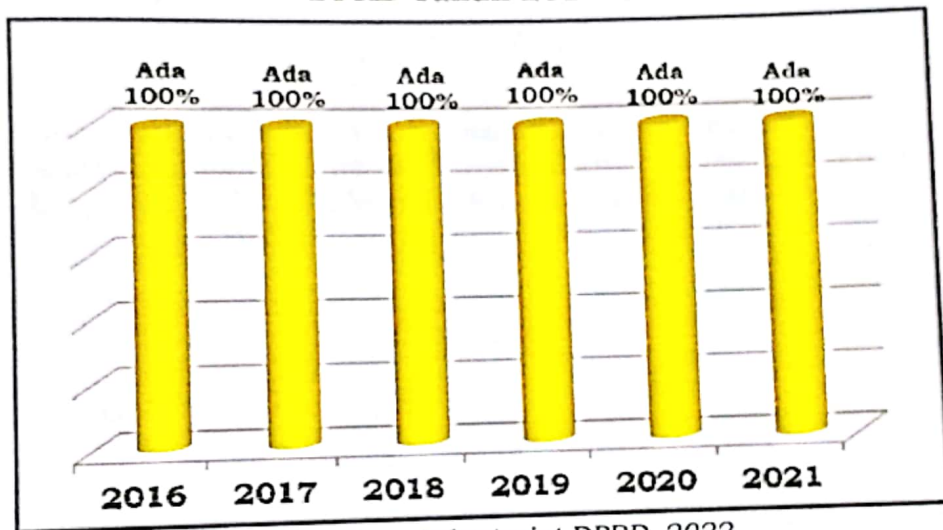
Berpedoman pada tabel diatas maka untuk menghitung capaian kinerja Indikator tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD tahun 2022 yang ditargetkan target Ada dan terealisasi Ada secara kuantitatif sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian kinerja} &= \frac{\text{Bobot Nilai Realisasi}}{\text{Bobot Nilai Target}} \times 100 \\
 &= \frac{\text{Ada}}{\text{Ada}} \times 100 \\
 &= \frac{100}{100} \times 100 \\
 &= 100
 \end{aligned}$$

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD ditargetkan Ada dan terrealisasi Ada dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Capaian kinerja tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD tahun 2022 yaitu Ada, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2021) yaitu Ada, maka menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja tahun 2022 sama dengan tahun sebelumnya yaitu dengan capaian kinerja sebesar 100%.

**Gambar. 3.4**  
**Tren Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2017-2022**



Sumber : Olahan Data Sekretariat DPRD, 2022

Tren realisasi indikator kinerja tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD selama 6 (enam) tahun terakhir yakni periode tahun 2017-2022 telah menunjukkan perkembangan yang positif yaitu telah mencapai target kinerja setiap tahunnya dengan realisasi Ada (100%).

Realisasi indikator kinerja tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD pada tahun 2022 dengan target Ada, jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) yaitu Ada, maka menunjukkan bahwa telah mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 yaitu Ada, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja ini dengan tren yang positif dan optimis dalam pencapaian target akhir RENSTRA tahun 2024.



**5) Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)**

Indikator Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) adalah tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD tahun 2022 dalam RPJM dan RKPD. Pada setiap tahun anggaran, program kerja DPRD tahun 2022 dalam RPJM dan RKPD tersusun dan terintegrasi (ada sesuai target kinerjanya).

Penghitungan indikator ini menggunakan metode konversi kualitatif menjadi kuantitatif dengan pemberian bobot nilai sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Konversi Bobot Indikator Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)**

Kategori	Bobot Nilai
Ada	100
Tidak Ada	0

Sumber : Data Olahan, 2022

Berpedoman pada tabel diatas maka untuk menghitung capaian kinerja Indikator Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan tahunan (RKPD) yang ditargetkan target Ada dan terealisasi Ada secara kuantitatif sebagai berikut:

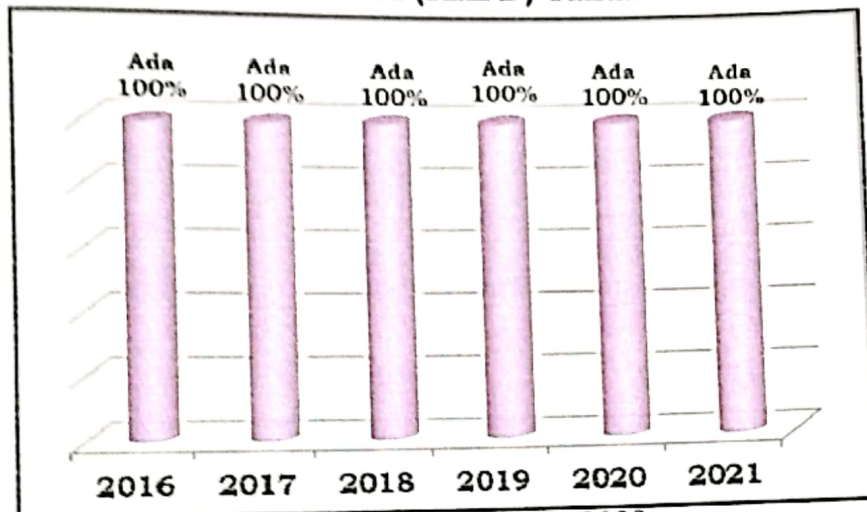
$$\begin{aligned}\text{Capaian kinerja} &= \frac{\text{Bobot Nilai Realisasi}}{\text{Bobot Nilai Target}} \times 100 \\ &= \frac{\text{Ada}}{\text{Ada}} \times 100 \\ &= \frac{100}{100} \times 100 \\ &= 100\end{aligned}$$

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD

untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD) telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, ditargetkan Ada dan tercalisasi Ada dengan capaian kinerja sebesar 100%.

**Gambar. 3.5**

**Tren Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD) Tahun 2017-2022**



Sumber : Olahan Data Sekretariat DPRD, 2022

Tren realisasi indikator kinerja Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD) selama 6 (enam) tahun terakhir yakni periode tahun 2017-2022 telah menunjukkan perkembangan yang positif yaitu telah mencapai target kinerja setiap tahunnya dengan realisasi Ada (100%).

Realisasi indikator kinerja Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD) dengan target Ada, jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) yaitu Ada, maka menunjukkan bahwa telah mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 yaitu Ada, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja ini dengan tren yang positif dan optimis dalam pencapaian target akhir RENSTRA tahun 2024.



**6) Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA Dan Anggaran Kedalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD**

Indikator Terintegrasi Program-Program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA dan anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD adalah terintegrasinya program kerja DPRD kedalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Tahun 2022.

Pada Setiap tahun anggaran, program kerja DPRD kedalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD selalu terintegrasi (ada sesuai target kinerjanya). Hal tersebut dilakukan guna mendukung Fungsi DPRD dalam hal pengawasan, pembentukan perda dan anggaran maka perlu didukung dengan program-program dan kegiatan DPRD yang diakomodir dalam RKA dan DPA Sekretariat DPRD.

Penghitungan Indikator ini menggunakan metode konversi kualitatif menjadi kuantitatif dengan pemberian bobot nilai sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Konversi Bobot Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Kedalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD**

Kategori	Bobot Nilai
Ada	100
Tidak Ada	0

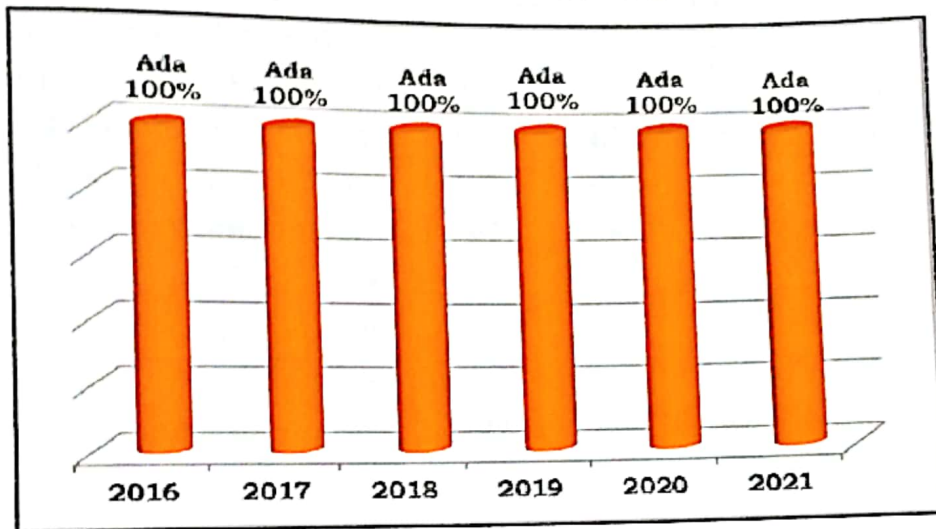
Sumber : Data Olahan, 2022

Berpedoman pada tabel diatas maka untuk menghitung capaian kinerja Indikator Terintegrasi Program-Program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD yang ditargetkan target Ada dan terealisasi Ada secara kuantitatif sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Capaian kinerja} &= \frac{\text{Bobot Nilai Realisasi}}{\text{Bobot Nilai Target}} \times 100 \\ &= \frac{\text{Ada}}{\text{Ada}} \times 100 \\ &= \frac{100}{100} \times 100 \\ &= 100\end{aligned}$$

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Terintegrasi Program-Program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, ditargetkan Ada dan tercalisasi Ada dengan capaian kinerja sebesar 100%.

**Gambar. 3.6**  
**Tren Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Kedalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Tahun 2017-2022**



*Sumber : Olahan Data Sekretariat DPRD, 2022*

Tren realisasi indikator kinerja Terintegrasi Program-Program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA dan anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD adalah terintegrasinya program kerja DPRD kedalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD selama 6 (enam) tahun terakhir yakni periode tahun 2017-2022 telah menunjukkan perkembangan yang positif yaitu telah mencapai target kinerja setiap tahunnya dengan realisasi Ada (100%).

Realisasi indikator kinerja Terintegrasi Program-Program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD dengan target Ada, jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) yaitu Ada, maka menunjukkan bahwa telah mencapai target kinerja tahun



akhir RENSTRA 2019-2024 yaitu Ada, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja ini dengan tren yang positif dan optimis dalam pencapaian target akhir RENSTRA tahun 2024.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan uraian penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Lembaga DPRD Dalam Rangka Mendukung Tugas, Fungsi Dan Wewenang** Tahun Anggaran 2021 sebesar **72,41%** atau dikategorikan **"Sedang"**.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima"** melalui upaya-upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang organisasi.
- 2) Adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao dengan Perangkat Daerah yang berwenang dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- 3) Dukungan fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah Provinsi NTT sebagai wakil pemerintah pusat di daerah terkhususnya melalui Sekretariat DPRD Provinsi NTT dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang DPRD; dan
- 4) Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, dalam pencapaian kinerja tahun 2022 masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Pandemi Covid 19 yang dialami oleh daerah berdampak pada pembatasan ruang gerak dan aktifitas lembaga DPRD sehingga menghambat pencapaian kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2022;
- 2) Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia Aparatur; dan
- 3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao pada tahun mendatang maka akan ditempuh

langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- 2) Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur; dan
- 3) Optimalisasi dan penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi.

Tabel. 3.8.

Program Pendukung Sasaran  
Meningkatnya kualitas pelayanan Lembaga DPRD dalam rangka mendukung  
Tugas, Fungsi dan Wewenang

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	7.965.231.220	6.908.220.857	86,73

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao Tahun 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan guna mendukung sasaran yaitu Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan dukungan anggaran sebesar Rp.7.965.231.220,- realisasi sebesar Rp.6.908.220.857,- atau sebesar 86,73%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2022 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel. 3.9.

Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran  
Meningkatnya kualitas pelayanan Lembaga DPRD dalam rangka mendukung  
Tugas, Fungsi dan Wewenang

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 - (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
100	96.86	3.14	Efisien	1.03	Efektif

Sumber data: Data Olahan Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao Tahun 2021

Profil Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao Tahun 2023



Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah mencapai tingkat efisiensi sebesar 3,14% atau dikategorikan sangat efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio 1,03% sehingga dikategorikan efektif.

#### **4. Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)**

Penyelenggara urusan pemerintahan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut;

- a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan (*Tidak ada*)
- b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan (*Tidak ada*)
- c. Urusan Pilihan (*Tidak ada*)
- d. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang dilaksanakan

Sebanyak 2 program, 15 kegiatan dan 43 sub kegiatan yang mendukung Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao dalam mencapai sasaran di Tahun 2021.

#### **5. Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10  
Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator)  
Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao

Sasaran	Indikator		Formula Pengukuran
Meningkatnya kualitas pelayanan Lembaga DPRD dalam rangka mendukung Tugas, Fungsi dan Wewenang	1.	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan
	2.	Jumlah Keputusan DPRD yang dihasilkan	Jumlah Keputusan DPRD yang dihasilkan
	3.	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang dihasilkan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang dihasilkan
	4.	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat - alat kelengkapan DPRD Kab. Rote Ndao	Ada
	5.	Tersusun dan terintegrasinya program - program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	Ada
	6.	Terintegrasi Program - Program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD	Ada

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao Tahun 2021



## 6. Laporan Keuangan

Adapun kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel. 3.11  
Realisasi Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao  
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	Jumlah	%
1.	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>22,588,614,702</b>	<b>21,276,098,560</b>	<b>94.19</b>
	Belanja Pegawai	10,816,906,237	10,706,940,420	98.98
	Belanja Barang dan Jasa	11,771,708,465	10,569,158,140	89.78
2.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>353,143,890</b>	<b>127,959,730</b>	<b>36.23</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	353,143,890	127,959,730	36.23
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>14,976,527,372</b>	<b>14,495,837,433</b>	<b>96.79</b>
	<b>Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>19,250,000</b>	<b>19,154,000</b>	<b>99.50</b>
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	10,000,000	9,944,000	99.44
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,250,000	9,210,000	99.57
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1,919,599,912</b>	<b>1,817,725,643</b>	<b>94.69</b>
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,812,800,092	1,711,206,843	94.40
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	106,799,820	106,518,800	99.74
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>23,382,000</b>	<b>23,220,000</b>	<b>99.31</b>
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	23,382,000	23,220,000	99.31
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>630,000,000</b>	<b>628,750,000</b>	<b>99.80</b>
6	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	630,000,000	628,750,000	99.80
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>773,194,540</b>	<b>539,430,180</b>	<b>69.77</b>
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19,185,100	19,185,100	100.00
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	302,731,640	77,101,400	25.47
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52,436,690	52,132,730	99.42
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89,987,700	89,987,600	100.00
11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	53,195,340	53,195,200	100.00
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31,599,900	29,036,900	91.89

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	Jumlah	%
13	Penyediaan Bahan/Material	93,912,170	93,912,150	100.00
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130,146,000	124,879,100	95.95
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>213,428,000</b>	<b>175,649,173</b>	<b>82.30</b>
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19,959,000	19,958,900	100.00
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	193,469,000	155,690,273	80.47
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>457,148,500</b>	<b>435,685,900</b>	<b>95.31</b>
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	318,689,600	299,309,900	93.92
18	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	29,027,900	28,996,000	99.89
19	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	89,455,000	87,430,000	97.74
20	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	19,976,000	19,950,000	99.87
	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>9,599,066,845</b>	<b>9,514,787,742</b>	<b>99.12</b>
21	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	8,921,856,145	8,869,033,577	99.41
22	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	305,790,700	277,152,800	90.63
23	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	371,420,000	368,601,365	99.24
	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>1,341,457,575</b>	<b>1,341,434,795</b>	<b>100</b>
24	Fasilitasi Fraksi DPRD	136,157,780	136,135,000	99.98
25	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	65,299,800	65,299,800	100.00
26	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1,139,999,995	1,139,999,995	100.00
	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>7,965,231,220</b>	<b>6,908,220,857</b>	<b>86.73</b>
II	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>2,071,514,600</b>	<b>1,961,666,300</b>	<b>94.70</b>
27	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	94,197,900	87,011,000	92.37
28	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1,942,678,900	1,847,537,500	95.10
29	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	34,637,800	27,117,800	78.29
	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>449,993,400</b>	<b>449,740,500</b>	<b>99.94</b>
30	Pembahasan KUA dan PPAS	29,997,000	29,980,000	99.94



No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	Jumlah	%
31	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	29,997,000	29,990,000	99.98
32	Pembahasan APBD	129,999,800	129,911,800	99.93
33	Pembahasan APBD Perubahan	129,999,800	129,935,200	99.95
34	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	129,999,800	129,923,500	99.94
	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>70,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>100</b>
35	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	70,000,000	70,000,000	100
	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>1,476,353,000</b>	<b>789,959,881</b>	<b>53.51</b>
36	Bimbingan Teknis DPRD	1,151,553,000	465,159,881	40.39
37	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	24,800,000	24,800,000	100
38	Penyediaan Kelompok Pakar Tim Ahli	90,000,000	90,000,000	100
39	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	210,000,000	210,000,000	100.
	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>2,573,679,220</b>	<b>2,567,895,100</b>	<b>99.78</b>
40	Kunjungan Kerja dalam Daerah	499,560,000	499,376,000	99.96
41	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	30,499,920	30,499,800	100.
42	Pelaksanaan Reses	2,043,619,300	2,038,019,300	99.73
	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>1,323,691,000</b>	<b>1,068,959,076</b>	<b>80.76</b>
43	Koordinasi dan Konsultasi Tugas DPRD	1,323,691,000	1,068,959,076	80.76
	<b>TOTAL</b>	<b>22,941,758,592</b>	<b>21,404,058,290</b>	<b>93.30</b>

Sumber: Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

- Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Alokasi anggaran Belanja Operasi sebesar Rp.22.588.614.702,- (Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah) realisasi sebesar Rp.21.276.098.560,- (Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh enam Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) atau 94,19%
- Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Alokasi anggaran belanja Modal Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp.353.143.890,- (Tiga Ratus Lima Puluh

*Tiga Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah)* realisasi sebesar Rp.127.959.730,- *(Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah)* atau 36,23%.

Alokasi anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 26.117.545.000,- (Dua Puluh enam Milyar Seratus Tujuh belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.21.404.058.290,- (Dua Puluh Satu Milyar Empat Ratus Empat Juta Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah) atau sebesar 93,30% yang terdiri dari 5 (lima) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 43 (Empat puluh tiga) sub kegiatan.



## BAB IV

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

#### A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao

Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, perencanaan pembangunan. Berdasarkan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kabupaten Rote Ndao saat ini telah dan selalu giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang, melalui proses evaluasi dan penyempurnaan program-program kerja yang dilaksanakan terhadap RPJMD. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao dilakukan berdasarkan visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao 2019-2024. Untuk menentukan isu strategis, didahului dengan melakukan identifikasi permasalahan, yaitu permasalahan pokok sampai dengan akar permasalahannya. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan.

Tabel 4.1  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tidak maksimalnya pelaksanaan tugas fasilitasi pimpinan dan anggota DPRD oleh Sekretariat DPRD	Perubahan regulasi yang cepat menyebabkan daya adaptif yang belum maksimal sehingga berdampak pada tidak maksimalnya pelaksanaan tugas DPRD	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur
		Kebijakan daerah yang mendadak akibat kebutuhan	Adanya kondisi yang mendesak

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		yang mendesak sehingga menyebabkan perencanaan anggaran dan legislasi serta tugas dan fungsi Sekretariat DPRD lainnya tidak dapat dilaksanakan secara optimal	dan belum diagendakan sebelumnya
		Terdapatnya ketidakselarasan antara peraturan perundangan tentang legislasi daerah serta belum diatur secara jelas dan rinci berbagai peraturan perundang-undangan sehingga masih menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Regulasi menimbulkan multitafsir
		Kurangnya unsur pelaksana atau staf PNS pada masing-masing bagian	Kurangnya Kuantitas Sumber Daya Aparatur
		Kurangnya kemampuan manajerial dan teknis Aparatur Sekretariat DPRD	Rendahnya SDM Aparatur
		Tenaga kontrak yang ada tidak menunjukkan kinerja yang maksimal	Rendahnya kesadaran tenaga kontrak
		Kelembagaan pendukung DPRD yang belum optimal, antara lain belum	Tidak ada tenaga teknis sesuai kebutuhan



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		mempunyai tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang profesional, dan tenaga yang memahami mengenai keprotokoleran pimpinan dan anggota DPRD, belum tersedianya tenaga penyedia sidang dan rapat-rapat yang professional	
		Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia ASN belum memadai	Rendahnya Sumber Daya Manusia ASN
		Adanya tuntutan yang tinggi dari pimpinan dan anggota DPRD terkait tugas pokok dan fungsi Kesekretariatan dimana Sekretariat DPRD dipandang sebagai institusi bawahan lembaga DPRD sehingga personil ASN Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya sering terbebani secara psikologis	Tuntutan yang tinggi dari pimpinan dan anggota DPRD dengan kondisi aparatur yang minim secara kuantitas maupun kualitas

**Tabel 4.2**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal (Kewenangan Perangkat Daerah)	Eksternal (Diluar) Kewenangan Perangkat Daerah	
Kajian Terhadap Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao, Kajian Terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas	Masih adanya kesenjangan capaian di antara beberapa indikator kinerja	IKK	- Kualitas SDM - Kuantitas SDM	- Kebijakan - Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga DPRD	1. Belum optimalnya kinerja DPRD yang dipublikasikan. 2. Belum optimalnya peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

**B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tahun 2019-2024 memiliki visi dan misi sebagai berikut:

**VISI : Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan.**

**MISI :**

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan;
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rote Ndao periode 2019-2024 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Sekretariat DPRD Kabupaten



Rote Ndao mendukung visi dan misi tersebut di atas, terutama pada *Misi Keempat*: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima. Sebagai bahan telaahan terhadap Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2019-2024 dilakukan identifikasi beberapa permasalahan, beserta faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao.

Faktor Penghambat:

1. Adanya regulasi yang berubah – ubah;
2. Bervariasinya sumber daya manusia maupun unsur politik dari DPRD;
3. Ketidaksesuaian beban kerja dengan kapasitas aparatur.

Faktor Pendorong:

1. Adanya kerjasama yang baik antar bagian secara sinergis dan terpadu;
2. Adanya kerjasama yang baik antara Sekretariat DPRD dan DPRD;
3. Adanya peningkatan kualitas aparatur;
4. Tersedianya anggaran yang memadai untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

#### **C. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bapenas dan Renstra Provinsi NTT**

Mengingat tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao sebagai unit penunjang dan pelayanan administratif maka sasaran program yang tertuang dalam Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah dapat terlaksana dengan baik dan saling melengkapi satu sama yang lain. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra DPRD Provinsi tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten dalam bidang perencanaan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Sekretariat DPRD menjalankan tugas dalam bidang Pemerintahan Umum yang lebih khusus mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Dengan kewenangan tersebut, maka penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah yang mencakup proses perencanaan dilakukan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota). Dikarenakan Sekretariat DPRD bukan merupakan lembaga teknis daerah, maka sasaran jangka menengah dari rencana strategis kementerian dan Provinsi tidak secara langsung berkaitan.

#### **D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Telaah RTRW Kabupaten Rote Ndao yang dimaksudkan adalah identifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao ditinjau dari implikasi RTRW. Mengingat tupoksi Sekretariat DPRD memiliki tugas utama terkait dengan tugas menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan maka tidak banyak berpengaruh atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh RTRW. Demikian pula yang terkait dengan pengelolaan atau optimalisasi pemanfaatan aset daerah juga tidak banyak terpengaruh atau mempengaruhi RTRW. Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ngao dalam melaksanakan hak dan fungsinya tidak banyak berpengaruh langsung atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Demikian pula yang terkait dengan pengelolaan atau optimalisasi pemanfaatan aset daerah juga tidak banyak terpengaruh atau mempengaruhi KLHS. Perencanaan dan penetapan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup yang menjadi keharusan dalam pembangunan daerah perlu dipahami dan ditaati oleh segenap masyarakat sehingga perlu disosialisasikan oleh Dewan secara



berkesinambungan agar tata ruang, kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat dikendalikan. Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi antara fisik dan non fisik perkotaan termasuk menjamin daya tampung dan daya dukung lingkungan, sehingga Kabupaten Rote Ndao selalu menjadi daerah yang nyaman. Hal ini diwujudkan keindahan dan kenyamanan serta penghijauan di lingkungan kantor Sekretariat dan lembaga DPRD. Sedangkan program dan kegiatan tidak ada yang berkaitan langsung terhadap perubahan lingkungan.

**a. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga sistem Pendukung DPRD, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam satu tahun ke depan adalah :

**1. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan**

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD diperlukan sistem administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mengikuti perkembangan teknologi, dengan mengikuti perkembangan teknologi diharapkan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih efisien dan efektif.

**2. Pemantapan Peran Sekretariat DPRD sebagai Fasilitator Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

Peran Sekretariat DPRD dalam Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD perlu ditingkatkan, Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao diharapkan menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholders baik ditingkat daerah pusat maupun di tingkat Provinsi termasuk swasta.

3. Mengkoordinir serta menyediakan tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli atau kelompok pakar yang diperlukan DPRD
- Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi DPRD dalam melahirkan kebijakan-kebijakan daerah yang aspiratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka alat kelengkapan DPRD perlu didukung oleh tenaga ahli / kelompok pakar yang profesional, yang pembentukannya difasilitasi oleh Sekretariat DPRD atas usul alat Kelengkapan DPRD.



**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BERTA PENDANAAN**  
**TAHUN 2022**

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan**

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao di Tahun 2022 secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1  
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (RP)
<b>II</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>25,250,341,000</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>16,690.928.223</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>43,610,000</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24,136,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19,474,000
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1,931.793.408</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,815.444.408
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	116.349.000
<b>3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>18,000,000</b>
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	18,000,000
<b>4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>676,800,000</b>
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	676,800,000
<b>5</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,133.028.430</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17,015,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	694,945.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	53,428,200
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	180,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53,195,230

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (RP)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30,529,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103,916,000
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>320,711,890</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24,281,890
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	296,430,000
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>583.634.750</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	445.188.850
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29,027,900
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	89,442,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19,976,000
<b>8</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>10,101,894,145</b>
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	9,449,856,145
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	292,802,000
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	359,236,000
<b>9</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>1,881,455,600</b>
	Fasilitasi Fraksi DPRD	136,155,800
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	65,299,800
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1,680,000,000
<b>II</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>9,426,616.777</b>
<b>1</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>2,236,176.000</b>
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	195,788,000
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2,015,388.000
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	25,000,000
<b>2</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>434,994,000</b>
	Pembahasan KUA dan PPAS	29,997,000
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	29,997,000
	Pembahasan APBD	125,000,000



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Pembahasan APBD Perubahan	125,000,000
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	125,000,000
<b>3</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>103,165,000</b>
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD	103,165,000
<b>4</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>1,655,973,777</b>
	Pendalaman Tugas DPRD	1,325,337,000
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	30,636,777
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	90,000,000
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	210,000,000
<b>5</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>3,673,660,000</b>
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	712,460,000
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	20,000,000
	Pelaksanaan Reses	2,941,200,000
<b>6</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>1,322,648,000</b>
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1,322,648,000

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Profil Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 menyajikan:

1. Informasi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023.
2. Gambaran pencapaian kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023

#### **B. Saran**

Profil Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 kiranya dapat menjadi bahan masukan untuk pencapaian kinerja dan sasaran pada tahun – tahun mendatang.

Ba'a, 20 Juni 2023  
Sekretaris DPRD Kab. Rote Ndao



**Benyamin Koamesah, S.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670828 199903 1 008